



**RENCANA PROGRAM KERJA JANGKA MENENGAH BADAN NARKOTIKA
NASIONAL PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2020 - 2024**



Manokwari, Oktober 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan ridho-Nya penyusunan Rencana Program Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat telah dapat diselesaikan.

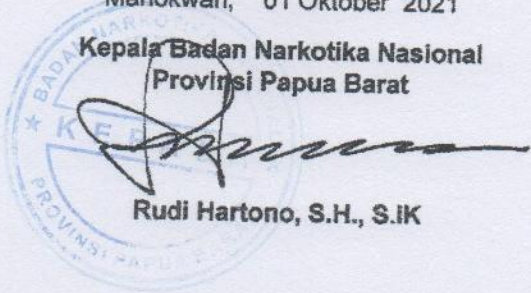
Rencana Program Kerja yang telah disusun ini merupakan acuan bagi seluruh jajaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Program Kerja yang telah disusun ini tidak berarti banyak tanpa implementasi dengan pelaksanaan yang tuntas, komitmen dan motivasi yang kuat dari seluruh jajaran SKPD. Masukan dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan dari semua pihak untuk kesempurnaan agar lebih baik di masa akan datang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Program Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat Tahun 2020 – 2024 ini diucapkan terima kasih.

Manokwari, 01 Oktober 2021

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Papua Barat



Rudi Hartono, S.H., S.IK

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 2011 sebagai tindak lanjut Undang-Undang (UU) Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya antara lain mengatur kelembagaan Badan narkotika Nasional (BNN) dari lembaga non struktural menjadi struktural sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Sesuai dengan amanat pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, BNN melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan berbagai kegiatan melalui Bidang Pencegahan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi, Bidang Pemberantasan, dan Bidang Hukum dan Kerjasama. Melalui kelima Bidang tersebut BNN bersinergi dengan seluruh elemen/komponen bangsa untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan Narkoba.

BNNP Papua Barat dalam melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun Anggaran 2020 - 2024 memiliki sasaran strategis yaitu **Meningkatnya Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Secara Efektif di Provinsi Papua Barat.**

1. Data Kasus Tindak Pidana Narkotika

Capaian kinerja Pemberantasan BNN Provinsi Papua Barat selama ini cenderung melebihi target yang ditentukan. Jumlah kasus tindak pidana narkoba yang P21 dan jumlah sindikat tindak pidana narkoba yang terungkap dari Tahun 2018–20210 adalah sebagai berikut :

NO	KASUS	2018		2019		2020	
		T	R	T	R	T	R
1	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang diselesaikan (P-21).	7	8	9	13	7	9

Sumber Data : LKIP BNNP Papua Barat

2. Data Penyalahguna Narkoba

Penyalahguna narkoba yang lapor diri atau voluntary penyalahguna narkoba yang lapor diri atau voluntary dan telah mendapat layanan rehabilitasi di BNN Provinsi Papua Barat pada tahun 2018 sebanyak 20 orang, tahun 2019 sebanyak 20 orang, dan tahun 2020 sebanyak 45 orang dan pada tahun 2021 sampai dengan bulan agustus sebanyak 9 orang, dengan demikian total penyalahguna yang melaporkan diri sepanjang tahun 2018 sampai dengan 2021 sebanyak 94 orang.

3. Data Fasilitas Rehabilitasi LRIP dan LRKM BNN Provinsi Papua Barat sebagai berikut :

TAHUN	IP		KM	
	T	R	T	R
2018	2	2	1	0
2019	2	2	0	0
2020	2	2	1	1

Sumber Data : LKIP BNNP Papua Barat

Dari table diatas menunjukkan bahwa keberadaan fasilitas Rehabilitasi baik milik INSTansi Pemerintah maupun Komponen Masyarakat selama kurun waktu 3 tahun tidak menunjukkan adanya peningkatan jumlah, hal ini di karenakan kurangnya tanggapan/ perhatian dari pemerintah daerah maupun tokoh masyarakat dalam berpartisipasi untuk melaksanakan kegiatan P4GN.

4. Data Kondisi Geografi Kewilayahan, Sekolah dan Perguruan Tinggi

BNNP Papua Barat berkedudukan di Manokwari dengan wilayah kerja seluas 99.671,63 km² yang terdiri dari 12 kabupaten dan 1 (satu) kota yaitu Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Fak Fak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrau.

Kondisi geografis Provinsi Papua Barat yang begitu sulit dijangkau antar Kabupaten/Kota. Kabupaten yang bisa dilalui jalur darat dari BNNP Papua

Barat yang terletak di Kabupaten Manokwari sebagai ibukota Provinsi hanya Manokwari Selatan dengan jarak tempuh 4 jam perjalanan darat, dan Kabupaten/Kota yang lain hanya bisa dijangkau dengan pesawat dan kapal laut. Perjalanan darat pun hanya bisa dilalui dengan kendaraan khusus tertentu seperti kendaraan dengan "*four wheel drive*" (4WD)/double gardan dikarenakan kondisi jalan yang masih baru (tanah dan berbatuan) dan memakan waktu paling dekat adalah sekitar 4 jam pada kondisi cuaca yang bagus (tidak hujan). Sehingga dalam menerapkan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) memerlukan upaya yang lebih keras lagi dibandingkan dengan daerah lainnya.

Papua Barat memiliki beberapa bandara sebagai arus keluar masuk Wilayah Provinsi Papua Barat seperti Bandara "Rendani" terletak di Manokwari dan Bandara " Eduar Edo Osok" terletak di kota Sorong serta beberapa Bandara kecil antar pulau seperti Bandara di kabupaten Fak-fak, Bandara di Raja Ampat sebagai kota wisata, Bandara di teluk Bintuni serta Bandara di Babo yang merupakan kabupaten industri pertambangan,

Pelabuhan Manokwari dan Pelabuhan Kota Sorong yang merupakan pelabuhan sebagai jalur masuk pintu utama bagi pendatang dari Provinsi lain.

Provinsi Papua Barat menurut jenis kelamin memiliki penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 516.242 orang, perempuan sebanyak 456.580 orang, sehingga total jumlah penduduk Papua Barat berdasarkan Sumber data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat menjadi 972.822 orang, dengan rata2 bekerja sebagai nelayan, petani ladang, PNS, wiraswasta, pengusaha. Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan usia sekolah dapat dilihat dalam table di bawah ini :

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Kelompok Umur/Age Groups																Total
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75+	
Fakfak	9 426	8 356	8 971	8 539	7 665	6 963	6 793	6 635	5 399	4 865	3 833	3 239	2 185	1 457	684	381	85 197
Kaimana	5 325	3 632	6 810	6 808	5 912	5 244	5 274	5 065	4 361	3 853	2 939	2 145	1 340	831	423	272	62 256
Teluk Wondama	4 333	4 124	4 883	4 216	3 747	3 480	3 465	3 287	2 727	2 151	1 583	1 360	979	629	342	238	41 844
Teluk Bintuni	7 211	6 821	7 757	8 047	8 498	8 910	8 632	8 214	6 963	5 892	4 145	2 645	1 581	997	461	289	87 083
Manokwari	18 666	17 507	17 606	17 443	19 936	18 876	16 925	15 040	13 348	10 831	8 556	6 718	4 930	3 289	1 866	1 126	152 663
Sorong Selatan	4 868	4 674	5 676	5 788	5 430	4 725	4 446	3 934	3 366	2 868	2 169	1 713	1 281	764	440	307	52 469
Sorong	10 186	9 420	10 566	11 217	10 884	10 764	10 131	9 889	8 626	7 567	6 112	4 746	3 406	2 524	1 495	1 146	118 679
Raja Ampat	6 974	6 051	7 162	6 482	5 598	5 771	5 511	5 108	4 288	3 408	2 386	2 043	1 601	956	471	331	64 141
Tambrauw	2 648	2 157	2 555	2 512	3 206	2 792	2 824	2 634	2 156	1 587	1 227	988	515	350	194	94	28 379
Maybrat	2 438	2 751	3 985	4 592	5 147	4 423	4 098	2 992	3 071	2 551	2 258	1 582	1 275	848	524	456	42 991
Manokwari Selatan	3 179	2 844	2 884	3 718	4 230	3 584	3 230	2 551	2 489	2 148	1 759	1 338	888	518	320	178	35 949
Pegunungan Arfak	1 658	1 774	2 573	3 459	4 614	4 184	4 701	3 439	3 529	2 885	2 301	1 440	906	401	218	125	38 207
Kota Sorong	22 764	22 569	24 031	25 091	27 234	19 150	27 551	24 761	20 858	17 286	13 510	10 646	7 882	5 774	3 005	2 258	284 410
Jumlah / Total :	99 676	94 680	105 159	108 012	112 101	108 786	103 581	93 589	81 181	67 894	52 795	40 603	28 769	19 338	10 463	7 441	1 334 068

Sumber Data : Papua Barat Dalam Angka (BPS Provinsi Papua Barat / Mei 2021)

Sedangkan Jumlah Sekolah di Provinsi Papua Barat dapat dilihat pada table di bawah ini :

Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Menurut Kabupaten/Kota									
	TK		SD		SMP		SMA		SMK	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Fakfak	-	23	14	14	20	20	6	6	3	3
Kaimana	-	15	85	85	16	16	4	4	3	3
Teluk Wondama	-	30	49	52	11	14	3	3	2	2
Teluk Bintuni	-	69	75	75	32	32	14	15	1	1
Manokwari	-	60	114	112	36	37	15	15	8	8
Sorong Selatan	-	10	81	83	18	18	4	4	3	3
Sorong	-	47	123	126	36	42	18	18	7	7
Raja Ampat	-	31	104	102	30	31	15	15	2	5
Tambrauw	-	2	46	52	13	14	3	5	3	3
Maybrat	-	0	59	59	12	12	3	3	1	1
Manokwari Selatan	-	9	39	33	8	8	5	5	1	1
Pegunungan Arfak	-	0	55	57	11	14	3	6	1	2
Kota Sorong	-	50	72	126	28	42	19	21	13	13
Papua Barat	-	346	916	976	271	300	112	120	48	52

Sumber Data : Papua Barat Dalam Angka (BPS Provinsi Papua Barat)

Perguruan Tinggi Negeri di Provinsi Papua Barat :

- 1) Politeknik Negeri Fak Fak, di Fak Fak;
- 2) Universitas Papua di Manokwari;
- 3) Universitas Kasuari di Manokwari;
- 4) STAIN Sorong, di Sorong;
- 5) Poltekkes Sorong;
- 6) Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong

Perguruan tinggi Swasta di Provinsi Papua barat :

- 1) Universitas Al Amin Sorong;
- 2) Universitas Kristen Papua, di Sorong
- 3) Universitas Victory Sorong di Sorong;
- 4) Institut Sains dan Teknologi Indonesia (ISTI), di Manokwari
- 5) Sekolah Tinggi Agama Islam Al Mahdi, di Fak fak
- 6) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Asy Syafi'iyah (STIA), di Fakfak;

- 7) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ottow dan Geissler, Fakfak;
- 8) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH), Bintuni;
- 9) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Papua (STIKES), Sorong
- 10) Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah (STIKIP Manokwari)

5. Data Sumber Daya Manusia BNN Provinsi Papua Barat

Keterbatasan sumber daya manusia di BNNP Papua Barat menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan kegiatan P4GN di wilayah Provinsi Papua Barat, secara keseluruhan jumlah personil BNNP Papua Barat ada 48 orang hal ini masih jauh dari jumlah personil ideal pada tingkat BNNP sesuai Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/606/VIII/KP.07.00/2019/BNN tentang Daftar Susunan Pegawai di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, dimana jumlah ideal untuk satker tingkat BNNP adalah sebanyak 523 orang/personil. di mana BNNP Papua Barat saat ini hanya memiliki sumberdaya manusia (SDM) sebanyak 46 orang terdiri dari PNS 14 orang, POLRI 10 orang dan PPNPN 17 orang, hal ini dapat dilihat dari table berikut :

Keadaan pegawai berdasarkan status kepegawaian

No	Pangkat / Gol	Jumlah		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	PNS BNN	8	6	14
2	POLRI	11	1	12
3	PPNPN	11	11	22
	Jumlah	30	18	48

Sumber data : Data Kepegawaian BNNP Papua Barat.

6. Sarana dan Prasarana yang dimiliki BNNP Papua Barat

Pada bidang Pemberantasan BNNP Papua Barat memiliki sarana dan prasarana berupa 1 buah brankas tempat penyimpanan senjata dan 1 buah lemari tempat penyimpanan Barang Bukti tahanan.

Senjata yang dimiliki Bidang Pemberantasan BNP Papua Barat berupa : Pistol CZ 07 sebanyak 9 buah, senapan semi otomatis merek SAIGA sebanyak 3 buah dan senjata api scorpion merk EVO 351 sebanyak 3 buah.

7. Gedung Kantor BNNP Papua Barat

BNNP Papua Barat sampai dengan saat ini masih menyewa Ruko sebagai Kantor BNNP Papua Barat.

8. Pada Bidang Rehabilitasi, BNNP Papua Barat memiliki Klinik Pratama “Kasuari” dengan perlengkapan berupa :

B. Potensi dan Permasalahan

Berdasarkan data yang diperoleh dan di sajikan pada Gambaran Umum diatas maka dapat menghasilkan Analisa data sebagai berikut “

1. Potensi

- a. Beberapa instansi pemerintah yang bersedia menjadi IPWL dan Organisasi Masyarakat yang bekerja sama, dapat membantu BNNP Papua Barat dalam menjangkau penanganan permasalahan penyalahgunaan narkoba, terutama dalam proses rehabilitasi;
- b. Penanganan masalah kejahatan narkoba semakin mengarah pada upaya kerjasama melalui pelibatan banyak Stakeholder dan pemerintah di Provinsi Papua Barat dengan membuat komitmen bersama melalui Perjanjian Kerjasama (PKS) anatar BNNP Papua Barat dengan beberapa stake holder.
- c. Meski masih jauh dari jumlah yang memadai, SDM dari personil BNNP Papua Barat merupakan modal utama dalam penanganan masalah P4GN di Provinsi Papua Barat.
- d. Keberadaan gereja, masjid, sekolah dan perguruan tinggi merupakan potensi bagi wahana sosialisasi terhadap keluarga, anak dan remaja maupun mahasiswa.

2. Permasalahan

- a. Tenaga Rehabilitasi baik yang berasal dari IPWL maupun organisasi masyarakat yang telah bekerjasama dengan BNNP Papua masih kurang, baik dari segi jumlah maupun kualitas, sehingga memerlukan bimbingan teknis yang melibatkan unsur masyarakat maupun IPWL sebagai usaha peningkatan kemampuan SDM di bidang Rehabilitasi;
- b. Letak kondisi geografis wilayah Provinsi Papua Barat yang berupa gunung dan laut memerlukan transportasi udara dan laut sehingga memerlukan pendanaan yang cukup besar;

- c. Kesadaran Masyarakat untuk melaporkan diri maupun keluarga masih kurang sehingga jumlah klien Voluntir sangat sedikit;
- d. Dukungan Pemerintah Provinsi Papua Barat terhadap keberadaan BNNP Papua Barat sangat kurang, hal ini terlihat dengan upaya BNNP Papua Barat untuk meminjam pakai Gedung atau permohonan hibah tanah yang sampai saat ini belum mendapat jawaban, sehingga BNNP Papua Barat masih menyewa Ruko sebagai Gedung kantor;
- e. Jumlah personil BNNP Papua Barat yang sangat minim mengakibatkan tertundanya pelaksanaan kegiatan yang telah dijadwalkan sesuai rencana pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan pada awal tahun
- f. Belum adanya BNNK pada wilayah Provinsi Papua Barat, sehingga BNNP Papua Barat belum mempunyai kepanjangan tangan untuk mengimplementasikan prgram-program yang akan dijalankan;
- g. Keberadaan Bandara dan pelabuhan laut sebagai pintu masuk utama ke wilayah provinsi papua barat sangat rentan terhadap peredaran gelap narkoba, sedangkan pelabuhan kecil yang ada di kabupaten menjadi tempat transit para pengedar gelap narkoba.

C. Landasan Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkoba Nasional;
- 7. Peraturan Badan Narkoba Nasional Nomor 05 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkoba Nasional;

8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.
10. Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tahun 2020 – 2014.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL

A. Tujuan Organisasi

Tujuan Organisasi BNN sebagaimana disebutkan dalam Renstra BNN 2020-2024 terdiri dari 2 tujuan, yakni:

1. Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Tujuan dan sasaran strategis tersebut dalam rangka mewujudkan masyarakat yang merasa terlindungi dan terselamatkan dari bahaya ancaman narkoba. Dalam hal ini, upaya penguatan ketahanan masyarakat harus terus ditingkatkan. Selain itu pengintegrasian upaya pencegahan dan pemberantasan sangat penting untuk terus ditingkatkan dalam rangka melemahkan pasar terutama dari sisi supply, melalui tindakan penangkapan dan pemberantasan jaringan pasar narkoba, pengungkapan jaringan dan penyitaan barang bukti beserta aset tersangka peredaran gelap narkoba.

2. Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas. Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporsional serta berkinerja tinggi.

Tujuan dan sasaran strategis ini merepresentasikan fokus kinerja kelembagaan BNN yang berorientasi pada hasil kinerja yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Penguatan kelembagaan yang profesional dan berkinerja tinggi ini akan memberikan wajah transformatif kelembagaan yang berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik di lingkungan BNN.

Tujuan dan sasaran strategis tersebut merupakan fokus yang harus dicapai BNN bersama seluruh perangkat organisasinya baik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam hal ini, BNN Provinsi Papua Barat sebagai salah satu unit organisasi BNN berkewajiban mengerahkan seluruh sumber daya dan kekuatannya untuk mencapai target organisasi yang telah ditetapkan.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Operasional

Kebijakan dan strategi operasional BNN Provinsi Papua Barat merupakan rumusan penjabaran dari kebijakan dan strategi BNN. Kebijakan dan strategi BNN tahun 2020-2024 adalah:

1. penguatan pengawasan jalur penyelundupan narkoba;
2. peningkatan kualitas penindakan kejahatan narkoba;
3. pembangunan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat;
4. peningkatan kapabilitas rehabilitasi;
5. penguatan sinergi dan kolaborasi stakeholder.

Kebijakan dan strategi BNN yang bersifat makro tersebut dispesifikasi dan disesuaikan dengan kondisi aktual permasalahan narkoba yang terjadi di wilayah provinsi. Selain itu, dalam rumusan Kebijakan dan strategi BNN Provinsi Papua Barat juga menyelaraskan dengan kebijakan BNN yang berorientasi pada penguatan pelaksanaan P4GN dan peningkatan kapasitas organisasi BNN.

Dalam hal ini, kebijakan dan strategi yang dirumuskan BNN Provinsi Papua Barat sifatnya sangat kontekstual dan sesuai dengan kondisi dan karakteristik kewilayahan. Adapun kebijakan dan strategi operasional BNN Provinsi Papua Barat sebagai berikut:

1. Peningkatan daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
2. Peningkatan daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

3. Peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN;
4. Peningkatan upaya pemulihan Kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan;
5. Peningkatan kapasitas tenaga teknis rehabilitasi;
6. Peningkatan aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba;
7. Peningkatan kualitas layanan rehabilitasi narkotika di klinik rehabilitasi;
8. Peningkatan pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya;
9. Peningkatan pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika;
10. Peningkatan proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien;
11. Peningkatan tata Kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur.

BAB III
RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
BNN PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2020 – 2024

Mengingat pentingnya peran BNNP Papua Barat dalam penanganan masalah penyalahgunaan narkoba, maka Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat menetapkan rencana kinerja Tahun 2020 – 2024, sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2020 – 2024. Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat sebagai gambaran pelaksanaan program kerja BNN dalam satu tahun kedepan di wilayah provinsi bersama seluruh jajaran unit kerja BNN Kabupaten/Kota. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan BNN Provinsi Papua Barat Tahun 2020 – 2024 sebagai mana terlampir.

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNN Provinsi Papua Barat Tahun 2020-2024 merupakan dokumen penjabaran rencana strategis BNN 2020-2024 yang sekaligus menjadi rujukan bagi seluruh jajaran unit kerja di wilayah Provinsi Papua Barat. Dalam dokumen Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNN Provinsi Papua Barat Tahun 2020-2024 telah menggambarkan desain rencana program kerja dan struktur kinerja seluruh jajaran BNN di wilayah Provinsi Papua Barat secara hirarkis sesuai ruang lingkup tugas dan kewenangan.

Lampiran 1

**Matriks Rencana Kinerja
Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat
Tahun 2020 – 2024**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	7	1	1	1	1
2	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	3	5	5	5	5
3	Penyelenggaraan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	8	4	2	2	2
4	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau	1	1	1	1	1

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t				
			2020	2021	2022	2023	2024
	wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	-	2,5	2,5	2,5	2,5
5	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	-	5	10	10	10
		Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	-	10	25	25	25
6	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	2	3	2	2	2
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	1	1	1	1	1
7	Pascarehabilitasi Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Papua Barat	-	3,2	3,2	3,2	3,2
8	Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan	1	-	-	1	1

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t				
			2020	2021	2022	2023	2024
9	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelas Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	7	5	5	5	5
10	Pengawasan Tahanan dan barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	-	-	-	-	-
11	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	100	100	100	100	100
12	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	100	100	100	100	100
13	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	-	-	-	-	-

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	-	-	-	-	-

Lampiran 2

Matriks Rencana Kebutuhan Pendanaan
Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat
Tahun 2020 – 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Pendanaan (dalam 000)					
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	310.000	181.875	90.500	120.000	140.000
2	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	70.000	50.000	120.000	150.000	180.000
3	Penyelenggaraan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	291.723	228.568	267.500	312.000	350.000

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Pendanaan (dalam 000)				
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	125.106	121.000	130.000	141.000	155.000
		Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"					
		Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	-	-			
5	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	497.508	220.388	290.210	335.500	365.000
		Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	-	-	-	-	-
6	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	275.119	160.443	158.459	165.000	177.000
		Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi					
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi					

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Pendanaan (dalam 000)				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi					
7	Pascarehabilitasi Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	109.756	60.530	61.000	72.535	78.554
8	Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	100.000	100.000	75.000	100.000	100.000
9	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	563.719	525.438	525.438	603.000	675.000
		Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan	-	-	-	-	-
10	Pengawasan Tahanan dan barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	170.750	126.525	173.775	215.325	247.220
		Nilai tingkat keamanan, keterlibatan, dan kesehatan tahanan					
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika					

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Pendanaan (dalam 000)				
			2020	2021	2022	2023	2024
11	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Papua Barat	94.820	38.438	61.756	65.377.	69.837
		Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	-	-	-	-	-
12	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Papua Barat	183.746	124.935	1.268.928	1.273.375	1.371.593
		Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	-	-	-	-	-

Lampiran 3
MATRIKS RENCANA OUTPUT DAN KOMPONEN/ SUB KOMPONEN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2020 - 2024

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN / SUB KOMPONEN
1	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Jumlah Kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "tinggi" di wilayah provinsi	SMP dan SMU Sederajat yang Memperoleh Pengembangan Soft Skill	Pelatihan Pengembangan Softskill di SMP dan SMU sederajat Diseminasi dan Edukasi Melalui Pemanfaatan Media Cetak Informasi dan Edukasi Melalui Pemanfaatan Media Luar Ruang Informasi dan Edukasi Melalui Placement (Penyangan Televisi Daerah Informasi dan Edukasi Melalui Media Online Koordinasi Persiapan Pengembangan Softskill di SMP dan SMU Sederajat Pelatihan Softskill di SMP dan SMU Sederajat
2	Penyelenggaraan Advokasi	Jumlah Kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori "tinggi" di wilayah provinsi	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa	Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Intensifikasi Pelaksanaan Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Pelaksanaan Penguatan Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa Koordinasi Dalam Rangka Fasilitas Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa Rapat koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Fasilitas Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa Fasilitas Pelaksanaan Program Advokasi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Fasilitas Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa

3	Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Jumlah Kabupaten/kota dengan Indeks kemandirian partisipasi berkategori "mandiri" di wilayah provinsi	Advokasi Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba	Pembinaan teknis Rapat Kerja Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022 Penetaan kelompok sasaran di instansi pemerintah Rapat Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan Masyarakat melalui Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di instansi pemerintah Workshop Pengglat P4GN Instansi Pemerintah Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba Melalui test urine Asistensi Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba Sinkronisasi Program dan Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di instansi pemerintah Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Instansi Pemerintah Penetaan kelompok sasaran di Lingkungan Swasta Asistensi Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba Konsolidasi Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba bagi BUMN, BUMD dan Dunia Usaha/Lingkungan Swasta Monitoring dan evaluasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Lingkungan Swasta Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Lingkungan Swasta Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan Masyarakat melalui Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Lingkungan Masyarakat Bimbingan Teknis Pengglat P4GN Instansi Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba Melalui Tes Urine Monitoring dan evaluasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Lingkungan Masyarakat Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat di Lingkungan Masyarakat Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan Masyarakat melalui Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Lingkungan Pendidikan Bimtek Pengglat P4GN di Lingkungan Pendidikan (Kota Sorong) Konsolidasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba Pada Lingkungan Pendidikan di Kota Sorong Monitoring dan evaluasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Lingkungan Pendidikan Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Lingkungan Pendidikan
---	-------------------------------------	---	---	--

4	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Jumlah Kawasan Rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "bahaya" menjadi "waspada"	Penilaian Kawasan Rawan Narkoba Pemetaan Potensi Pada Kawasan Rawan Narkoba Perkiraan/Pedesaan di Kota Sorong Raker Dalam Rangka Sinergi Program pemberdayaan Alternatif dengan stakeholder Pengembangan Kapasitas Pada Kawasan Rawan Narkoba Bimbingan Teknis Lifeskill Bagi Masyarakat Kawasan Rawan Narkoba di Wilayah Perkotaan Birtek Pendamping Dalam Rencana Aksi Dayatif pada Kawasan Rawan Narkoba Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Alternatif Pada Kawasan Rawan Perkotaan di Kota Sorong	Penilaian Kawasan Rawan Narkoba Pemetaan Potensi Pada Kawasan Rawan Narkoba Perkiraan/Pedesaan di Kota Sorong Raker Dalam Rangka Sinergi Program pemberdayaan Alternatif dengan stakeholder Pengembangan Kapasitas Pada Kawasan Rawan Narkoba Bimbingan Teknis Lifeskill Bagi Masyarakat Kawasan Rawan Narkoba di Wilayah Perkotaan Birtek Pendamping Dalam Rencana Aksi Dayatif pada Kawasan Rawan Narkoba Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Alternatif Pada Kawasan Rawan Perkotaan di Kota Sorong
		Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi	Penilaian Kawasan Rawan Narkoba Pemetaan Potensi Pada Kawasan Rawan Narkoba Perkiraan/Pedesaan di Kota Sorong Raker Dalam Rangka Sinergi Program pemberdayaan Alternatif dengan stakeholder Pengembangan Kapasitas Pada Kawasan Rawan Narkoba Bimbingan Teknis Lifeskill Bagi Masyarakat Kawasan Rawan Narkoba di Wilayah Perkotaan Birtek Pendamping Dalam Rencana Aksi Dayatif pada Kawasan Rawan Narkoba Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Alternatif Pada Kawasan Rawan Perkotaan di Kota Sorong	Penilaian Kawasan Rawan Narkoba Pemetaan Potensi Pada Kawasan Rawan Narkoba Perkiraan/Pedesaan di Kota Sorong Raker Dalam Rangka Sinergi Program pemberdayaan Alternatif dengan stakeholder Pengembangan Kapasitas Pada Kawasan Rawan Narkoba Bimbingan Teknis Lifeskill Bagi Masyarakat Kawasan Rawan Narkoba di Wilayah Perkotaan Birtek Pendamping Dalam Rencana Aksi Dayatif pada Kawasan Rawan Narkoba Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Alternatif Pada Kawasan Rawan Perkotaan di Kota Sorong
5	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Jumlah petugas penyelenggaraan layanan IBM yang terlatih	Petugas Pelaksanaan Intervensi Berbasis Masyarakat yang Diberikan Pelatihan Tenaga Rehabilitasi yang Diberikan Peningkatan Kompetensi Teknis	Pelatihan Petugas Intervensi Berbasis Masyarakat Bimbingan Teknis Petugas IBM Monitoring Rencana Aksi Petugas Rehabilitasi dan Petugas AP Monitoring Rencana Aksi Peningkatan Kompetensi Teknis Petugas Rehabilitasi Peningkatan Kompetensi Teknis Sertifikasi Petugas Rehabilitasi Verifikasi Tempat Uji Kompetensi Uji Sertifikasi Konseleor Adiksi
6	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) di wilayah provinsi	Layanan Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota Layanan IBM Layanan surat keterangan Layanan pemeriksaan psikologi tipe-A Layanan pemeriksaan psikologi tipe-B Lembaga rehabilitasi yang operasional Facilitasi Lembaga Rehabilitasi di BNNK/Kota Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang terbentuk	Operasional Fasilitas Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota Operasional Fasilitas Rehabilitasi di BNNP Layanan Rawat Jalan Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan (Rajel) Layanan IBM Penerimaan Awal Layanan Wajib Layanan Pilihan Binaan Lanjut Layanan SKHPN Layanan Pemeriksaan Psikologi Tipe-A Layanan Evaluasi Psikologi Tipe-A Layanan pemeriksaan psikologi Tipe-B Layanan Evaluasi Psikologi Tipe-B Bimbingan teknis dan asisten fasilitas rehabilitasi Bimbingan Teknis Lembaga Rehabilitasi Koordinasi kelengkapan Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi Monitoring fasilitas rehabilitasi Monitoring dan Evaluasi Lembaga Rehabilitasi Monitoring dan Evaluasi Evaluasi Fasilitas Rehabilitasi SPM Pembentukan unit IBM Penentuan Unit IBM Supervisi dan asistensi Asistensi Evaluasi Unit IBM Operasional unit IBM Operasional Unit IBM

7	Pasca-rehabilitasi Penyalahguna dan / atau pecandu narkoba	Indeks kepuasan layanan	Data dan Pelaporan Klien Rehabilitasi	Pengolahan Data Pengukuran Kualitas Hidup Evaluasi Pelaporan Data Rapat Monitoring dan Evaluasi
8	Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Jumlah Jamuan peredaran gelap Narkotika dan prekursor	Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor	Pengumpulan Informasi Intelijen Pemelehan Informasi Intelijen
9	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika	Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika Penyelidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika Penyidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika
10	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika Nilai tingkat keamanan, keterlibatan dan kesehatan tahanan	Layanan pengawasan dan pengelolaan barang bukti narkotika dan non-narkotika Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan Tindak Pidana Narkotika, Prekursor Narkotika dan TPPU (Unit Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana	Pengawasan dan Pengelolaan Barang Bukti Pengeluaran Barang Bukti Pengawasan dan Perawatan Tahanan Tindak Pidana Narkotika (Unit Vertikal) Perawatan Kesehatan Tahanan Pengawasan Tahanan Pelaksanaan Asesmen Terpadu (unit Vertikal) TANPA SUB KOMPONEN
11	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran BNNP Papua Barat	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Perencanaan Kinerja dan Penganggaran (Unit Kerja Pusat dan Unit Kerja Mandiri) Kajian Pengembangan Kebijakan dan Program P4GN Kewilayahan Kajian Pengembangan Kebijakan dan Program P4GN Kewilayahan (Pengumpulan Data) Kajian Pengembangan Kebijakan dan Program P4GN Kewilayahan (Pengolahan dan Analisa Data) Kajian Pengembangan Kebijakan dan Program P4GN Kewilayahan (Penyusunan Laporan Kajian) Kordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kinerja BNN Provinsi Pemantauan dan pelaporan kinerja unit vertikal Kordinasi dan Sinkronisasi Data Laporan RAN P4GN Wilayah

12	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP Papua Barat	Layanan Perkantoran	Gaji dan Tunjangan TANPA SUB KOMPONEN Operasional dan Pemeliharaan Kantor Administrasi Kegiatan Rekonsiliasi Laporan Keuangan ke Kanwil DJPBN Rekonsiliasi Laporan Keuangan ke KPPN Rekonsiliasi Laporan Keuangan ke KPKML Sorong Rekonsiliasi Penyalpaian Laporan PNBPN ke KPPN Penyampaian SPN ke KPPN Pengelolaan Sistem Akuntansi Tingkat UAKPA
			Layanan Manajemen Keuangan	Konsolidasi perbendaharaan Rekonsiliasi dan Penelaahan Data Keuangan Un audited Rekonsiliasi dan Penelaahan Data Keuangan Semester I Penyusunan Laporan PNBPN Semester II T.A 2021 Penyusunan Laporan PNBPN Semester I T.A 2022 Rekonsiliasi dan Penelaahan Data Keuangan Semester II